

BAB IV

KESIMPULAN

Hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru mengalami berbagai fase. Seperti pendapat Aminuddin menyatakan dua varian pola hubungan antara negara dan Islam yaitu konfrontatif dan akomodasi, yang diselingi satu periode transisi. Abdul Aziz Thaba membagi pola hubungan negara dan Islam menjadi tiga fase yaitu antagonistik, resiprokal-kritis, dan akomodatif. Kamsi juga membagi tiga hubungan yaitu masa harmonis, masa pertentangan dan masa akomodatif atau habituasi. Berdasarkan pendapat dari Kamsi, Abdul Aziz Thaba dan Aminuddin dapat ditarik kesimpulan ada masa-masa ketegangan, antagonistik, dan konfrontasi antara negara dan Islam khususnya tokoh-tokoh muslim. Dimana negara bersikap represif terhadap siapa saja yang berani mengkritik pemerintah atau memiliki pendapat yang berseberangan dengan penguasa. Terutama bagi mereka yang vokal menentang kebijakan pemerintah yang otoriter khususnya pada tokoh-tokoh muslim baik politikus maupun para pendakwah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan antara negara terhadap tiga tokoh muslim seperti A.M. Fatwa, Abu Bakar Ba'asyir, dan Muhammad Natsir dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, jiwa zaman yang dihadirkan dalam buku biografi tiga tokoh muslim tersebut adalah Orde Baru masa penuh dengan kontrol pemerintah dan penguasa. Pada masa Orde Baru dikenal dengan rezim represif pada Islam khususnya tokoh muslim yang vokal mengkritik pemerintah. Semua itu

disebabkan oleh Orde Baru menganggap Islam menjadi ancaman potensial bagi negara. Pasalnya berdirinya Orde Baru berkat bantuan umat Islam. Umat Islam mengharapkan berdirinya Orde Baru mampu menguatkan kedudukan Islam dalam negara. Akan tetapi Orde Baru memandang umat Islam masih berkeinginan mengubah dasar negara berdasarkan ideologi Islam. Demi menekan kemungkinan tersebut maka negara pada masa Orde Baru menggunakan senjata yang ampun yaitu Pancasila. Berbagai kebijakan penguasa negara dilegalkan atas nama Pancasila.

Kedua, penulis biografi Abu Bakar Ba'asyir yang ditulis oleh Hendra Juansyah dan Muhammad Natsir ditulis oleh *Tempo*, serta autobiografi A.M. Fatwa memperlihatkan pola hubungan antagonistik, konfrontasi ataupun pertentangan ketiga tokoh muslim ini dengan negara. A.M. Fatwa dalam bukunya sendiri menyatakan sikap pertentangannya dengan pemerintah terhadap kebijakan politik melalui mimbarnya. A.M. Fatwa mengkritik pemerintah juga didukung dan dekat dengan tokoh-tokoh tentara yang terpinggirkan dalam kekuasaan politik Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru merespon sikap A.M. Fatwa dengan kekerasan fisik, tekanan mental, dan masuk penjara. Abu Bakar Ba'asyir dalam tulisan Hendra Juansyah bahwa beliau dengan keyakinan dan tindakannya serta mengajak santrinya untuk menolak Pancasila sebagai bentuk pertentangan pada pemerintahan Orde Baru. Bahkan Abu Bakar Ba'asyir juga menyuarakan golput pada pemilu 1977 melalui Radio Dakwah Islamiyah Surakarta (RADIS). Pemerintahan Orde Baru pada tindakan Abu Bakar Ba'asyir yaitu menutup RADIS, menyerang pesantren yang didirikan Ngruki yang didirikan oleh beliau,

dan pada akhirnya masuk sel tahanan. Sedangkan *Tempo* menggambarkan Muhammad Natsir mengkritik kebijakan Orde Baru yang sewenang-wenang pada Islam. Seperti pernyataan Soeharto yang menyatakan yang mengkritik pemerintah berarti mengkritik Pancasila, penerapan asas tunggal Pancasila terhadap semua partai politik ataupun organisasi Islam. Orde Baru yang tidak suka dikritik menanggapi tindakan Muhammad Natsir dengan tekanan non fisik yaitu tidak boleh ikut serta dalam partai politik, tidak boleh bepergian keluar negeri untuk menghadiri kongres Internasional, dan tidak mau memberikan gelar pahlawan pada beliau.

Dalam ketiga buku tersebut digambarkan tekanan yang diberikan oleh negara tergantung dengan cara tokoh-tokoh muslim tersebut menyampaikan pendapatnya maupun pengaruh tokoh dalam panggung perpolitikan Indonesia. Ada dua tokoh muslim yang kurang memiliki pengaruh dalam pentas nasional dan menyampaikan pendapatnya dengan berani seperti A.M. Fatwa dan Abu Bakar Ba'asyir. A.M. Fatwa dengan tulisannya sendiri menyatakan melalui mimbar pidatonya seringkali berbicara tentang sikap otoriter penguasa serta kesalahan-kesalahan penguasa yang tidak memihak pada umat Islam. Hendra Juansyah menggambarkan dalam bukunya Abu Bakar Ba'asyir secara terang-terangan mengajak murid-muridnya dan masyarakat agar tidak terlibat dalam pemilihan umum serta menolak Pancasila. Gagasan versi negara yang menjadi alat untuk membersihkan ideologi lainnya. Sikap bersebrangan kedua tokoh muslim ditanggapi oleh negara dengan tekanan fisik maupun kekerasan fisik seperti dipenjara maupun penganiayaan melalui alat-alat negara. Sedangkan tokoh

Muhammad Natsir yang digambarkan *Tempo* menjawab sikap otoriter pemerintah dengan politik santunnya. Selain itu juga, Muhammad Natsir adalah tokoh muslim yang berpengaruh pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Beliau memiliki jabatan penting pada masa Orde Lama yaitu Perdana Menteri dan Menteri Penerangan. Akibatnya Muhammad Natsir mengalami tidak mengalami kekerasan fisik.

Adapun tujuan penulisan biografi tiga tokoh antara lain: pertama, A.M. Fatwa menulis autobiografinya sebagai bentuk pembelaan diri terhadap sikap represif negara. Pada masa Orde Baru siapapun yang menentang dan mengkritik pemerintah sama artinya dengan mengkritik Pancasila alias anti Pancasila. A.M. Fatwa tidak ingin dicap sebagai anti Pancasila dan ekstrimis garis keras. Maka dari itu, datangnya masa kebebasan berpendapat era reformasi A.M. Fatwa mempublikasikan buku tentang kekerasan yang dialaminya pada publik. Sehingga gelar anti Pancasila dan ekstrimis muslim tidak melekat pada diri A.M. Fatwa. Kedua, biografi Abu Bakar Ba'asyir yang ditulis Hendra Juansyah memiliki tujuan untuk memperoleh gelar akademik di UGM. Terlepas dari tuntutan kampus untuk menulis sebuah karya ilmiah, sebenarnya Hendra Juansyah tertarik menulis tentang ISIS di Sulawesi. Terlebih pemberitaan tentang ISIS adalah tema yang sangat menarik untuk dikaji karena gerakan tersebut menginginkan negara berlandaskan Islam. Ini sangat bertentangan dengan konsep dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Akan tetapi, keterbatasan dana dan susahny akses sehingga dipilih untuk menulis tentang Abu Bakar Ba'asyir. Terakhir, biografi Muhammad Natsir yang diangkat berdasarkan investigasi *Tempo* dikarenakan

majalah ini kritis dan independen. Majalah *Tempo* memiliki ideologi liberal. Dimana bebasnya penggambaran tokoh-tokoh dari kalangan manapun. Bahkan, *Tempo* berani menuliskan tokoh yang memiliki ideologi yang dilarang di Indonesia. *Tempo* ingin memberi gambaran perjuangan sosok Muhammad Natsir dalam menjadikan Islam sebagai dasar negara.



